Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-XI/2013 Terhadap Penyelesaian Tunggakan Iuran Jkn Bpjs Kesehatan Oleh Perseroan Terbatas Dalam Proses Hukum PKPU/Pailit

Lili Riyanti As¹; Fidji Muhammad Sobar²; Agus Satory³.

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Indonesia.

³ Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia.

E-mail: lili_law_riyanti@ymail.com, fidjims@gmail.com, agussatory@unpak.ac.id

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menegaskan kedudukan tunggakan iuran JKN BPJS Kesehatan sebagai kewajiban prioritas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum putusan tersebut, kendala teknis dan interpretasi yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan implementasi di lapangan. Berdasarkan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Putusan MK memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya menghadapi berbagai hambatan, seperti tidak adanya regulasi teknis yang jelas, interpretasi yang tidak seragam di kalangan pelaku hukum, dan kurangnya keterlibatan aktif BPJS Kesehatan dalam proses hukum. Dalam beberapa kasus, hak BPJS Kesehatan untuk menerima pembayaran tunggakan iuran kerap diabaikan karena kurangnya pemahaman dan prioritas yang diberikan oleh kurator atau hakim. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi teknis, peningkatan peran aktif BPJS Kesehatan, dan harmonisasi pemahaman di antara para pelaku hukum untuk memastikan implementasi Putusan MK berjalan efektif. Langkah-langkah ini penting untuk mendukung keberlanjutan program JKN dan perlindungan hak pekerja atas jaminan Kesehatan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, BPJS Kesehatan, tunggakan iuran JKN, PKPU, kepailitan.

The Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 affirms the status of overdue JKN BPJS Health contributions as a priority obligation in the process of Debt Payment Obligation Postponement (PKPU) and bankruptcy. This research aims to analyze the legal implications of this decision, the technical challenges and interpretations faced during its implementation, and to provide recommendations for optimizing its practical application. Based on a normative juridical method, this study finds that while the MK Decision provides a strong legal basis, its implementation encounters various obstacles, such as the lack of clear technical regulations, inconsistent interpretations among legal practitioners, and insufficient active involvement of BPJS Health in the legal process. In some cases, BPJS Health's rights to receive overdue contribution payments are often overlooked due to a lack of understanding and priority given by curators or judges. The research concludes that there is a need for strengthening technical regulations, enhancing the active role of BPJS Health, and harmonizing understanding among legal actors to ensure the effective implementation of the MK Decision. These steps are crucial for supporting the sustainability of the JKN program and protecting workers' rights to health insurance.

Keywords: Constitutional Court Decision, BPJS Health, JKN contribution arrears, PKPU, bankruptcy.

A. Pendahuluan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan salah satu sistem dalam perlindungan sosial di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN)¹ dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), seluruh badan usaha, termasuk perseroan terbatas, diwajibkan untuk membayar iuran JKN bagi pekerja mereka.² Kewajiban ini bertujuan menjamin akses layanan kesehatan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak kasus badan usaha yang menunggak pembayaran iuran JKN, terutama ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan atau berada dalam proses hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.³

Permasalahan ini menjadi hambatan karena dalam proses PKPU dan pailit, terdapat berbagai klaim yang diajukan oleh kreditur, termasuk BPJS Kesehatan sebagai pihak yang menagih tunggakan iuran JKN. Hak atas pembayaran iuran JKN sering kali bersaing dengan hak-hak kreditur lainnya, seperti pemegang gadai atau hipotek, serta hak karyawan atas gaji yang belum dibayarkan.⁴ Untuk memberikan kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa tunggakan iuran JKN merupakan kewajiban yang harus diprioritaskan dalam proses PKPU dan pailit. Putusan ini menempatkan iuran JKN dalam kategori utang yang mendukung kesejahteraan sosial dan memiliki kedudukan yang setara dengan hak-hak pekerja lainnya.⁵

Meskipun Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 telah memberikan landasan hukum

¹ Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

² Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara.

³ Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2009-2016.

⁴ Ibid

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Pasal 113 Ayat (1) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

yang kuat, implementasi putusan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya regulasi teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaan prioritas pembayaran tunggakan iuran JKN dalam proses hukum PKPU dan pailit.⁶ Selain itu, kurangnya pemahaman di kalangan pelaku hukum, termasuk hakim dan kurator, tentang kedudukan iuran JKN sebagai utang prioritas sering kali menyebabkan tunggakan iuran JKN tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini berpotensi mengancam keberlanjutan program JKN dan hak pekerja atas jaminan kesehatan.⁷

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap penyelesaian tunggakan iuran JKN BPJS Kesehatan oleh perseroan terbatas dalam proses PKPU dan pailit. Selain itu, artikel ini juga membahas kendala yang dihadapi dalam implementasi putusan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan serta regulasi teknis yang mendukung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkuat perlindungan terhadap hak pekerja atas jaminan kesehatan dan keberlanjutan program JKN di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penyelesaian tunggakan iuran JKN BPJS Kesehatan dalam proses PKPU dan kepailitan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menggali prinsip-prinsip hukum terkait kedudukan iuran JKN dalam proses hukum, serta pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, termasuk literatur hukum, jurnal ilmiah, buku dan artikel terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memadukan interpretasi hukum dan evaluasi implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum tunggakan iuran JKN, mengevaluasi kendala dalam pelaksanaan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, dan memberikan rekomendasi solusi untuk memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan program JKN dan perlindungan hak pekerja.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 memberikan kepastian hukum terkait kedudukan tunggakan iuran JKN BPJS Kesehatan sebagai kewajiban prioritas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. Putusan ini memperkuat posisi hukum BPJS Kesehatan sebagai pihak yang berhak menagih iuran JKN yang tertunggak, meskipun badan usaha berada dalam kondisi insolvensi. Iuran JKN dinilai sebagai hak pekerja yang harus dilindungi, sejalan dengan prinsip kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan putusan ini di lapangan masih menemui banyak

⁶ Soelistyo, L. T. D., & HAS, Y. N. A. (2021). Upaya Kepailitan sebagai Alternatif Buruh Mendapat Haknya. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 183-193.

⁷ Nola, L. F. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan (Implementation of Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 Related to the Position of Workers' Wages in Bankruptcy). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(2), 149-166.

kendala.

A. Kedudukan Hukum Tunggakan Iuran JKN BPJS Kesehatan dalam Proses PKPU dan Pailit

Tunggakan iuran JKN BPJS Kesehatan memiliki kedudukan hukum yang sangat penting dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun kepailitan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, iuran JKN yang tertunggak dinyatakan sebagai kewajiban prioritas yang harus diselesaikan sebelum pemenuhan klaim kreditur lainnya. Putusan ini memperkuat kedudukan hukum iuran JKN sebagai kewajiban yang berkaitan langsung dengan hak dasar pekerja atas jaminan kesehatan, yang merupakan bagian dari kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut menetapkan bahwa kewajiban yang berhubungan dengan kesejahteraan pekerja, termasuk iuran JKN, harus didahulukan sebelum pembayaran kewajiban kepada kreditur lainnya, kecuali kreditur separatis seperti pemegang hipotek atau gadai.⁹ Pendekatan ini sesuai dengan prinsip perlindungan hak pekerja yang menjadi landasan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), yang menegaskan bahwa badan usaha memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi iuran JKN, tanpa terkecuali dalam situasi kesulitan finansial. Meskipun demikian, kedudukan prioritas ini dalam praktiknya sering kali mengalami kendala. Salah satu kendala utama adalah konflik dengan hak-hak kreditur separatis. Kreditur separatis sering kali menuntut pembayaran berdasarkan jaminan yang mereka miliki, yang secara hukum juga diakui sebagai prioritas. Dalam kondisi di mana aset debitur terbatas, sering kali terjadi persaingan antara pembayaran kepada kreditur separatis dan pembayaran iuran JKN. Selain itu, dalam beberapa kasus, pihak kurator atau hakim tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kedudukan prioritas iuran JKN sebagaimana diatur dalam Putusan MK dan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Kendala lainnya adalah tidak adanya mekanisme teknis yang jelas untuk memastikan pembayaran tunggakan iuran JKN dalam proses PKPU dan kepailitan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum mengatur secara rinci prosedur pelaksanaan prioritas pembayaran iuran JKN, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Akibatnya, BPJS Kesehatan sering kali kesulitan memastikan pembayaran tunggakan iuran sesuai dengan haknya.¹¹ Dengan landasan hukum yang kuat melalui Putusan MK dan peraturan terkait, penting untuk memastikan bahwa kedudukan prioritas tunggakan iuran JKN dapat diterapkan secara konsisten dalam proses hukum. Harmonisasi regulasi dan penguatan implementasi teknis diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program JKN dan melindungi hak pekerja atas jaminan sosial.¹²

B. Implementasi Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 di Lapangan

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan meskipun secara hukum telah

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Pasal 113 Ayat (1) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

⁹ Man S. Sastrawidjaja. (2006). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / Man S. Sastrawidjaja. Hlm.52.*

¹⁰ Ibid. Hlm.57.

¹¹ Risdayanti, A. S. B. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Window of Public Health*, 2(3), 1306-1317.

¹² Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2009-2016.

menegaskan bahwa tunggakan iuran JKN BPJS Kesehatan adalah kewajiban prioritas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun kepailitan.¹³ Salah satu kendala utama adalah tidak adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai mekanisme pembayaran tunggakan iuran JKN dalam proses hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memang menyebutkan bahwa kewajiban yang berhubungan dengan kesejahteraan pekerja, termasuk iuran JKN, harus didahulukan pembayarannya. Namun, ketiadaan panduan ini sering kali menyebabkan kebingungan di lapangan. Akibatnya, banyak kasus di mana tunggakan iuran JKN tidak diprioritaskan sebagaimana mestinya.¹⁴

Masalah lainnya terletak pada kurangnya konsistensi interpretasi di antara para pelaku hukum. Dalam praktik, hakim dan kurator memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kedudukan tunggakan iuran JKN dibandingkan dengan kreditur separatis seperti pemegang gadai atau hipotek. Ketika aset debitur yang sedang dalam proses PKPU atau pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban, iuran JKN sering kali diabaikan.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK telah memberikan kepastian hukum, pelaksanaannya masih jauh dari optimal karena tidak semua pihak memahami dan menerapkan putusan tersebut dengan benar. Selain itu, peran BPJS Kesehatan dalam proses ini masih belum maksimal. Dalam banyak kasus, BPJS Kesehatan kurang aktif dalam memastikan haknya terpenuhi selama proses PKPU atau pailit berlangsung.¹⁶ Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau kurangnya koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan kepailitan. Akibatnya, meskipun iuran JKN memiliki dasar hukum yang kuat, BPJS Kesehatan sering kali kesulitan untuk mendapatkan pembayaran tunggakan yang menjadi haknya.¹⁷

Meskipun Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih terganjal oleh kekurangan regulasi teknis, ketidakkonsistenan penegakan hukum, dan lemahnya pengawasan. Agar tunggakan iuran JKN dapat benar-benar diprioritaskan, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan pemahaman hukum, dan peningkatan keterlibatan aktif BPJS Kesehatan dalam proses hukum terkait.

C. Kendala Teknis dan Interpretasi dalam Pelaksanaan

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan menghadapi berbagai kendala teknis dan interpretasi hukum yang menghambat implementasi yang efektif. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengaturan teknis yang detail dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.¹⁸ Meskipun UU ini mengatur bahwa utang yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, termasuk tunggakan iuran JKN BPJS Kesehatan, harus diprioritaskan, tidak ada panduan spesifik mengenai mekanisme pembayaran dalam konteks PKPU atau kepailitan. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan skema prioritas ketika aset debitur

¹³ Harahap, R. R. (2023). Implementasi Pembagian Harta Debitur Pailit Oleh Kurator Atas Upah Pekerja Yang Terhutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 268-280.

¹⁴ Christiawan, R. (2020). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Rajawali Pers. Hlm.104.

¹⁵ Retnaningsih, H. (2018). Prinsip Portabilitas Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Di Kota Jambi Provinsi Jambi Dan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan). *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 153-72.

¹⁶ Hasanah, A. N. (2022). Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Buruh Ditinjau dari Putusan Judicial Review MK NO. 67/PUU-XI/2013.

¹⁷ Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2).

¹⁸ T Sihombing, Herman., & Heliany, I. (2021). Analisis Yuridis Kedudukan Upah Pekerja Pada Perusahaan Yang Pailit Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013. *Delegasi*, 1(1), 40-57.

yang dinyatakan pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang.¹⁹ Kendala lainnya adalah interpretasi yang beragam dari para pelaku hukum, seperti hakim, kurator, dan pengacara yang terlibat dalam proses kepailitan. Dalam beberapa kasus, kurator lebih memprioritaskan hak kreditur separatis seperti pemegang gadai atau hipotek dibandingkan dengan tunggakan iuran JKN. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kedudukan iuran JKN sebagai bagian dari kewajiban prioritas yang ditegaskan melalui Putusan MK. Ketika aset debitur terbatas, konflik kepentingan sering kali terjadi antara kreditur separatis, BPJS Kesehatan, dan pihak lain yang memiliki klaim terhadap debitur. Selain itu, keterlibatan BPJS Kesehatan dalam proses hukum ini masih terbatas. Dalam beberapa kasus, BPJS Kesehatan tidak hadir secara aktif dalam proses PKPU atau kepailitan, sehingga sulit memastikan bahwa tunggakan iuran JKN diprioritaskan. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh sumber daya yang terbatas dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, seperti kurator atau pengadilan.²⁰

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK telah memberikan kepastian hukum, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Tanpa pengaturan teknis yang lebih jelas dan pemahaman yang seragam dari para pelaku hukum, pelaksanaan prioritas pembayaran tunggakan iuran JKN BPJS Kesehatan sering kali terhambat. Kendala ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa hak pekerja atas jaminan sosial dapat dilindungi secara efektif sesuai dengan tujuan Putusan MK.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memberikan kepastian hukum bahwa tunggakan iuran JKN BPJS Kesehatan memiliki kedudukan sebagai kewajiban prioritas dalam proses PKPU dan kepailitan. Putusan ini menegaskan bahwa iuran JKN bukan hanya sekadar utang biasa, tetapi berkaitan langsung dengan hak dasar pekerja atas jaminan kesehatan yang wajib dilindungi. Kendati demikian, implementasi putusan ini masih menemui berbagai kendala di lapangan. Kendala utama meliputi kurangnya pengaturan teknis yang rinci, ketidakkonsistenan interpretasi di antara para pelaku hukum, dan keterbatasan peran aktif BPJS Kesehatan dalam memastikan haknya dipenuhi. Dalam banyak kasus, konflik antara klaim kreditur separatis dan kewajiban pembayaran tunggakan iuran JKN sering kali mengakibatkan hak BPJS Kesehatan terabaikan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan penguatan regulasi teknis melalui penerbitan aturan turunan seperti Peraturan Menteri atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur mekanisme pembayaran tunggakan iuran JKN dalam proses hukum PKPU dan kepailitan secara rinci. BPJS Kesehatan juga harus lebih proaktif dalam setiap tahapan proses hukum dengan meningkatkan pengawasan dan keterlibatan, baik dalam pengajuan klaim maupun pemantauan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran iuran. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi kepada para hakim, kurator, dan pengacara mengenai kedudukan hukum tunggakan iuran JKN sebagai kewajiban prioritas menjadi hal yang penting untuk memastikan pemahaman yang seragam. Pengawasan dan koordinasi yang lebih baik antara BPJS Kesehatan, pemerintah, dan pihak-pihak terkait juga diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Putusan MK ini. Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 dapat berjalan lebih efektif, sehingga keberlanjutan program JKN terjamin dan hak

¹⁹ Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 130-137.

²⁰ Nola, L. F. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan (Implementation of Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 Related to the Position of Workers' Wages in Bankruptcy). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(2), 149-166.

pekerja atas jaminan kesehatan dapat terlindungi secara maksimal, bahkan dalam kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Pasal 113 Ayat (1) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.Indonesia.

B. Jurnal

- Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2).
- Harahap, R. R. (2023). Implementasi Pembagian Harta Debitur Pailit Oleh Kurator Atas Upah Pekerja Yang Terhutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 268-280.
- Hasanah, A. N. (2022). Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Buruh Ditinjau dari Putusan Judicial Review MK NO. 67/PUU-XI/2013.
- Nola, L. F. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan (Implementation of Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 Related to the Position of Workers' Wages in Bankruptcy). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(2), 149-166.
- Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2009-2016.
- Retnaningsih, H. (2018). Prinsip Portabilitas Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Di Kota Jambi Provinsi Jambi Dan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan). *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 153-72.
- Risdayanti, A. S. B. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Window of Public Heath*, 2(3), 1306-1317.
- Soelistyo, L. T. D., & HAS, Y. N. A. (2021). Upaya Kepailitan sebagai Alternatif Buruh Mendapat Haknya. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 183-193.
- T Sihombing, Herman., & Heliany, I. (2021). Analisis Yuridis Kedudukan Upah Pekerja Pada Perusahaan Yang Pailit Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013. *Delegasi*, 1(1), 40-57.
- Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 130-137.

C. Buku

- Christiawan, R. (2020). Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Rajawali Pers.
- Man S. Sastrawidjaja. (2006). Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.